



Islam dan Ideologi Dalam Pembangunan di Indonesia: Studi Terhadap Program Nawacita

Abd. Rahman

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

ar.mawazi@gmail.com

Rizki Pradana Hidayatulah

STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Pradanarizki110792@gmail.com

Abstrak: *The Islamic political movement in Indonesia still leaves the battle of discourse regarding the formalization of Islamic Shari'a as an ideology and Pancasila as the ideology adopted by the current state. This discourse battle is also often a stumbling block of government programs because the modernization carried out by the government often clashes with the values set by the community. This paper would like to see the correlation between Islam as an ideology and the development program in the cabinet of Joko Widodo and Jusuf Kalla. In its program, infrastructure development is so dominant in the hope of being able to support the national economic movement. In an Islamic perspective, the concept of modernization chosen by the government is part of the program of maslahat al-ummah or the interests of the people and is already a government obligation to fulfill. However, the practice that occurs in Indonesia is as it is known in the deconfidentialization theory, that is, the general values of religious teachings are the main values in the state but the state is not based on religion. In this case, the modernization practices applied by the cabinet of Joko Widodo and Jusuf Kalla were more likely to be secularized. This pattern is still similar to that applied by the previous government. In an effort*

to accommodate the ideological interests of Islamic groups, the Jokowi-JK government still cannot make an appropriate compromise. The efforts made by the government are merely proposing jargon, namely the Mental Revolution.

Abstrak: Gerakan politik Islam di Indonesia masih menyisakan pertarungan wacana perihal formalisasi syariat Islam sebagai satu ideologi dan Pancasila sebagai ideologi yang dianut negara saat ini. Pertarungan wacana ini juga kerap menjadi batu sandungan program pemerintahan karena modernisasi yang dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan tatanan nilai yang dianut masyarakat. Makalah ini hendak melihat korelasi antara Islam sebagai ideologi dengan program pembangunan dalam Nawacita kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam programnya, pembangunan infrastruktur begitu dominan dengan harapan mampu menjadi menopang pergerakan ekonomi nasional. Dalam perspektif Islam, konsep modernisasi yang dipilih oleh pemerintah merupakan bagian program masalah *al-ummah* atau kepentingan orang banyak dan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi. Meski demikian, praktik yang terjadi di Indonesia ialah seperti yang dikenal dalam teori dekonfensialisasi, yakni nilai-nilai umum dari ajaran agama menjadi nilai utama dalam bernegara tetapi negara tidaklah berdasarkan pada agama. Dalam hal ini, praktik modernisasi yang diterapkan oleh kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla lebih cenderung pada sekularisasi. Pola ini masih serupa dengan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam upaya mengakomodir kepentingan ideologis dari kelompok Islam, pemerintahan Jokowi-JK masih belum bisa melakukan kompromi yang sesuai. Upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah mengajukan jargon saja, yakni Revolusi Mental.

Kata kunci: *Fatwa, Intensitas, Kaidah Fiqih, Darūrah, Hājah.*

A. Pendahuluan

Islam memiliki norma-norma untuk setiap tindakan manusia. Bagi umat Islam, pedoman moral harus bersumberkan padanya, sebab Islam merupakan ajaran norma-norma bagi kehidupan yang bersifat sakral dan profan. Selain itu, Islam juga merupakan sumber pengetahuan yang bisa dijadikan inspirasi dalam membangun sebuah sistem sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Hal ini pula yang

membuat beberapa gerakan atas nama Islam tumbuh subur di negara ini, bahkan sejak awal kemerdekaan.¹

Dalam konteks sosiologis, agama dalam realitas kehidupan pemeluknya bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat fisik-biologis, sosial ekonomi dan politik, maupun kebutuhan integratif yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan manusia seperti kebutuhan untuk bermoral, beradab, dan hak lainnya bersidat esensial bagi kehidupan manusia.² Namun, tidak semua ajaran Islam telah memberikan suatu cara bagi sebuah mekanisme tentang persoalan kehidupan dunia secara detail, melainkan hanya sekedar norma saja yang bisa dijadikan acuan dalam menggapai keseimbangan sistem agar tatanan kehidupan duniawiyah bisa berjalan baik dan pemenuhan kewajiban ilahiyah bisa ditunaikan. Diakui atau tidak, peranan agama selalu menjadi daya pendorong bagi umatnya untuk mengarah pada sebuah perubahan.³ Dalam sebagian pandangan cendekia muslim, negara merupakan institusi tertinggi untuk menyatukan cita-cita bersama dalam suatu wilayah tertentu.⁴

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah selalu mengambil kebijakan pembangunan dalam upaya melakukan perubahan yang lebih baik bagi warganya. Dalam upaya realiasi untuk menjaga keseimbangan sistem itu, pemerintah berperan penting dalam menjalankan mekanisme pembangunan. Sebuah rencana pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara menjadi bagian

¹ Gerakan politik agama seperti itu selalu tumbuh di Indonesia. Pasca reformasi, gerakan Islam politik justru semakin subur. Mereka diawali dengan gerakan puritanisme dalam dakwah tetapi dalam gerakan politik menjadi cukup radikal, seperti menerbitkan kekerasan dan teror. Tentang hal ini lihat Johannes Haryatmoko, *Etika politik dan kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003), h.62-90 dan Bilveer Singh dan Zuly Qodir, *Gerakan Islam non mainstream dan kebangkitan Islam politik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.327-409.

² Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Manusia Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.108.

³ Peranan serupa tidak hanya dimiliki oleh Islam, agama-agama lain juga terbukti telah mampu menjadi penggerak bagi umatnya untuk melakukan perubahan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Max Weber yang menemukan peranan Kristen Protestan yang memotivasi pemeluknya untuk menjadi kapitalis dan penelitian Robert Billah ketika melakukan penelitian terhadap pengaruh ajaran Tokugawa terhadap kaum samurai yang berhasil membangun Jepang. Lihat Fachri Ali, *Agama, Islam & Pembangunan* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), h.28. dan Max Weber, *Sosiologi*, terj. Noorkholis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 361.

⁴ Zuhairi, "Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik," *ANALISIS* 14, no. 1 (2014), <http://dx.doi.org/10.42042/analisis.v14i1.639>, h.43.

penting dalam mengantar manusia ke arah yang lebih baik sehingga penduduknya pun bisa sejahtera.⁵ Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah sering kali mengikuti proses atau tahapan yang pernah sukses dilakukan oleh negara lain. Saat ini, ideologi yang dianut dalam pembangunan ialah modernisasi dengan pembangunan ekonomi dan ilmu pengetahuan menjadi tumpuannya. Pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah pedalaman dan industrialisasi, ditujukan agar esklarasi menuju masyarakat modern lebih cepat. Semua kebijakan itu atas nama kesejahteraan sebab kesejahteraan akan memberikan ketentraman dan keadilan.

Dengan demikian, maka hubungan agama dan negara merupakan hubungan simbiosis mutualisme, yakni keduanya saling membutuhkan satu sama lain untuk meningkatkan keseimbangan hidup setiap warga—yang juga umat beragama—agar bisa lebih baik. Menempatkan agama dalam posisi ini akan lebih relevan daripada memisahkannya. Memang, banyak anggapan bahwa kemajuan suatu negara ketika berhasil memisahkan antara hal-hal sakral keagamaan dengan nilai profan keduniawian. Tetapi nyatanya, dalam sejarah perkembangan masyarakat dunia, agama masih tetap memiliki peranan penting terhadap sistem sosial. Karena itu, hubungan simbiosis agama dan negara dalam pembangunan merupakan hal tak terelakan supaya pembanguan juga tidak mengesampingkan nilai norma dan kultural yang terdapat dalam agama.⁶

Dalam konteks pembangunan Indonesia saat ini, pemerintah telah mengambil kebijakan pembangunan berbasiskan modernisasi. Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memperlihatkan betapa pemerintahan ini sangat kental sekali dalam menganut paradigma modernisme. Segala kebijakan pemerintah mengikuti alur perkembangan yang dicetuskan kalangan modernis yang menekankan perlunya mengalihkan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses seluruh daerah agar mobilisasi manusia dan barang bisa lebih cepat dan mengundang investor dari

⁵ Piet H Khaidir, *Nalar kemanusiaan, nalar perubahan sosial* (Jakarta: Teraju, 2006), h.35.

⁶ Franz Magnis-Suseno, *Etika politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.355-363.

luar negeri menanamkan modal untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Dua kebijakan pembangunan ekonomi beralih pada keadilan sosial demi menggapai kesejahteraan rakyat.⁷

Landasan ideologis dari setiap pembangunan di Indonesia ialah Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga merupakan landasan moral kehidupan berbangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab itu, pejabat, pengusaha dan masyarakat harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam berfikir dan bertindak karena Indonesia bukanlah negara berdasarkan pada agama tertentu, bukan pada ras tertentu, dan pula bangsa tertentu. Maka, dalam setiap pembangunan negara ini, harus sejalan dengan semangat ideologi Pancasila.⁸ Dalam suatu perspektif, Pancasila sebagai kontrak sosial umat beragama dalam bernegara di Indonesia.⁹

Pertanyaannya, bagaimana relasi agama dan ideologi dalam pembangunan di suatu negara? Bagaimana pula dengan pengalaman Indonesia terkait relasi ketiganya? Kajian ini penting untuk melihat perkembangan di Indonesia, khususnya dalam era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam upaya membangun Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat selama setahun periodenya. Apalagi cita-cita pembangunan yang diharapkan ialah mampu mengentaskan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

⁷ Kajian antara demokrasi dan kapitalisme memang cukup mencuat di kalangan para pemikir. Sebab, demokrasi memang kerap bergandengan dengan kapitalisme. Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia, politik menganus sistem demokrasi tetapi perekonomiannya bermazhab kapitalisme. Hal ini terlihat dengan langkah kebijakan industrialisasi dan liberalisasi ekonomi. I Wibowo, Franz Magnis-Suseno, dan B Herry-Priyono, *Sesudah filsafat: esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 150-158.

⁸ Mochdar Soleman dan Mohammad Noer, “Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015,” *POLITIK* 13, no. 1 (2017), h.1971.

⁹ Ellya Rosana, “Eksistensi Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Umat Beragama,” *Jurnal TAPIS* 13, no. 2 (2017): 18, <http://dx.doi.org/10.24042/tapis.v13i2.2031>.

B. Pembangunan dan Modernisasi

Kalangan toritisi modernis menyakini bahwa negara yang ingin maju harus meniru langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh negara Barat. Dalam perspektif teori modernisasi, masyarakat harus dipindah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern dengan cara sekularisasi dan industrialisasi. Dengan demikian, maka suatu negara akan bisa maju setara dengan negara-negara maju dari Barat. Dalam proses modernisasi ini, sekularisasi dan industrialisasi memiliki dampak signifikan terhadap berbagai bidang, baik sosial, budaya, politik, dan lebih-lebih ekonomi. Dampak tersebut tidak bisa dihindari karena bagian dari tuntutan untuk mencapai masyarakat modern.

Menurut Donald Smith, ada lima tipologi peroses sekularisasi. Pertama, *policy separation secularisation*, yakni pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Kedua, *policy expansion secularisation*, yakni tolok ukur bagi sebuah tindakan adalah ilmu pengetahuan. Ketiga, *political cultural secularisation*, yakni semua hal telah menjadi satu dalam budaya modern dan tidak ada lagi area yang sakral sebagaimana dalam budaya tradisional. Keempat, *political process secularisation*, yakni segala proses politik berlandaskan rasionalitas dan pragmatis. Dan kelima, *polity dominant secularisation*, yakni dominasi politik atas keyakinan, praktik dan organisasi keagamaan.

Sedangkan dampak sekularisasi pada agama, menurut Jose Cassanova, ada tiga implikasi.¹⁰ Pertama, *the decline of religion* (kemerosotan peran agama). Inilah pemahaman yang dianut oleh sebagian besar muslim tentang definisi sekularisasi, sehingga ada “stigma” yang mengharuskan untuk takut terhadap sekularisasi. Kedua, sekularisasi bermakna “diferensiasi”, yaitu adanya pemisahan yang jelas antara ranah agama dan ranah politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Ketiga, sekularisasi mengimplikasikan “privatisasi”, yaitu pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah ruang di mana setiap orang tanpa melihat agama, suku, ras maupun golongan dapat melakukan kontestasi

¹⁰ Dikutip dari bahan ajar Prof. Dr. Abd. Salam Arif, MA, dan juga pembahasan Sholahuddin dalam islamlib.com yang merujuk pada Jose Casanova, *Public Religion in The Modern World* (Chicago: The University of Chicago Press, 1994).

secara bebas. Kata kunci dalam ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Sedangkan ruang privat adalah ruang di mana seseorang bisa hidup dalam dirinya sendiri, tanpa campur tangan dan intervensi dari pihak lain. Inilah wilayah “independen dan otonom” hingga seseorang bebas untuk memilih atau tidak memilih atas segala sesuatu. Dalam ruang tersebut dimungkinkan seseorang mengembangkan potensi diri, tanpa adanya intervensi dari institusi luar.

Melihat praktik modernisasi di Indonesia, sebenarnya tidak ada pemisahan secara pasti antara agama dan negara. Adanya Kementerian Agama (kemenang) adalah bukti bahwa agama masih menjadi urusan negara tetapi tidak berdasarkan pada satu agama tertentu. Hubungan yang dianut seperti Indonesia disebut hubungan simbiosis dari pendekatan realistik dan prinsipil, yakni pendekatan yang tidak tertarik pada hal-hal utopis melainkan lebih pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis ditampung dalam Islam dan tentang politik dan negara. Karena itu, dalam kajian ini perlu juga dilihat tentang teori dekonfensialisasi oleh C.A.O van Neumenhuijze. Teori dekonfensialisasi menyatakan bahwa nilai-nilai umum dari ajaran agama menjadi nilai utama dalam bernegara tetapi negara tidaklah berdasarkan pada agama. Memang secara tidak langsung teori ini memisahkan agama dan negara, tetapi mengakui sebagian hal-hal tentang agama justru diakomodir oleh negara. Misalnya tentang sila pertama yang berbunyi “ketuhanan” dan kehadiran Kemenang itu. Dengan demikian, Islam juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan nilai-nilai dasar dan ideologi Indonesia.¹¹

C. Nawacita dan Pembangunan di Era Jokowi-JK

Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla memiliki program kerja prioritas yang disebut dengan *nawacita*¹² atau sembilan pokok prioritas. Nawacita merupakan kerangka konsep dari

¹¹ Bandingkan dengan Moh Dahlan, “Hubungan Agama dan Negara Di Indonesia,” *ANALISIS* 14 (2014): 28, <http://dx.doi.org/10.42042/analisis.v14i1.635>.

¹² Nawacita terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa sansekerta. Nawa berarti sembilan dan cita bermakna harapan. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

rencana pembangunan yang akan menjadi acuan bagi pemerintahan ini dalam setiap kebijakan yang hendak diambil. Adapun bunyi dari nawacita itu yakni perkuat peran negara, perkuat pelayanan publik, penguatan anti korupsi, membangun dari daerah dan desa, meningkatkan produktivitas rakyat, ekonomi berbasis komoditi strategis domestik, menjaga kualitas hidup rakyat, revolusi karakter bangsa, dan perkokoh *bhineka tunggal ika*. Untuk kepentingan itu, kabinet ini memilih jargon “Revolusi Mental”.¹³

Dari nawacitanya itu, beberapa program telah dicanangkan oleh pemerintah untuk masa lima tahun mendatang. Program pembangunan itu sebagai berikut: 1) Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 km; 2) Membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama; 3) Membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang lama; 4) Membangun 10 kawasan industri dan pengembangan hunian buruhnya; 5) Membangun 5000 pasar tradisional yang telah ada; 6) Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi 15 hari; dan 7) Membangun sejumlah science and techno park di kawasan politeknik dan setiap SMK dengan Prasarana dan Sarana dengan Terknologi terkini.¹⁴

Dari nawacita itu, beberapa kebijakan yang telah cukup populer ialah dengan pembangunan infrastruktur seperti tol darat, tol laut, dan juga pembangunan rel ganda. Joko Widodo memang telah meresmikan beberapa tol yang telah dikerjakan sejak pemerintahan SBY sebelumnya. Artinya, beberapa pembangunan merupakan lanjutan dari program pembangunan pemerintahan sebelumnya. Hal ini adalah bagian upaya kesinambungan pembangunan agar tidak hanya berhenti setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan. Ambisi untuk melanjutkan pembangunan itu tampak jelas sekali, apalagi dengan ketimpangan pembangunan yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia ini.

Fenomena itu tampak jelas sekali dengan masih banyaknya daerah di luar Jawa yang pertumbuhannya tidak maksimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya, ketika di daerah-daerah

¹³ Syam Surya Syamsi, “Nawa Cita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi,” 2015.

¹⁴ Dirangkum dari berbagai sumber. Lihat Mariman Darto, “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri,” *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 3 (2015), h. 260.

di Jawa dan beberapa kota besar di luar Jawa itu terus tumbuh, namun masih lebih banyak lagi daerah-daerah yang terbaengkalai karena sarana dan prasarananya masih sangat minim. Daerah-daerah pulau dan daerah terdepan di negeri ini merupakan daerah yang sangat merasakan lambatnya pembangunan.¹⁵ Akibatnya, masyarakat berbondong-bondong menuju kota-kota yang dengan pengharapan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Kenyataan ini akan memperparah keadaan daerah tertinggal itu sebab yang tersisa di daerah itu hanyalah sebagian orang dengan kemampuan sumberdaya yang terbatas.

Wajarlah bila pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kemudian melanjutkan pembangunan yang bersifat sarana dan prasana itu. Alasan yang seringkali dilontarkan ialah pemerataan pembangunan yang berkeadilan demi mensejahterakan rakyat. Kala konsentrasi pembangunan lebih fokus ke daerah perkotaan saja, pembangunan desa menjadi semakin termarjinalkan. Karena itu, menurutnya, hasil produksi para petani tidak bisa didistribusikan lebih baik dan bahkan menyebabkan harga hasil pertanian dan perkebunan menjadil murah dan pendapatan mereka pun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Semangat membangun dari daerah pinggiran ini juga untuk mengubah pola distribusi terkesan centralistik di daerah metropolitan. Dengan pola seperti ini, maka distribusi menjadi dari daerah ke pusat, atau dari daerah ke kota dengan harapan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah serta dapat mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial.¹⁶ Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tidak sedikit dana yang dibutuhkan, bahkan pinjaman luar negeri juga lebih banyak untuk pembiayaan infrastruktur.

Besarnya nilai dana yang dibutuhkan membuat pemerintahan ini melakukan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, yakni

¹⁵ Fitri Halimah, "Studi Deskriptif Penerapan Program Nawacita Presiden Joko Widodo Tentang Membangun Indonesia Dari Pinggiran Terhadap Kesejahteraan Warga Di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo" (Universitas PGRI Yogyakarta, 2017), h.5.

¹⁶ Mochdar Soleman dan Mohammad Noer, "Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015," *POLITIK* 13, no. 1 (2017), h. 1970.

mengurangi subsidi berbagai bidang untuk memenuhi ambisi pembangunannya, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi tarif tangkutan dan subsidi listrik. Argumen yang diajukan ialah bahwa banyak penikmat subsidi ialah dari kalangan menengah dan bukan dari kalangan tidak mampu. Hal inilah yang kemudian disebut dengan liberalisasi pasar, harga diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan pemerintah tidak lagi memiliki andil yang besar dalam menentukan harga. Karena itu, pemerintah berniat mengalihkan subsidi yang konsumtif menjadi dana yang produktif.

Dan untuk memenuhi hasrat pembangunan serta mempercepat proses produktifitas itu, pemerintah juga mengundang langsung para investor luar negeri saat menghadiri pertemuan internasional maupun pertemuan bilateral dengan beberapa negara. Presiden Joko Widodo kerap menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peluang investasi serta sumberdaya yang banyak dimiliki Indonesia. Tentu saja ajakan ini dengan iming-iming kemudahan dalam proses perizinan, keringanan pajak serta jaminan keamanan. Memang, dalam setahun ini ajakan itu belum terlalu terasa walaupun dikabarkan bahwa sang presiden berhasil menarik investasi. Yang jelas, negeri ini memiliki ketergantungan pada negara lain karena ketidaksiapan dalam rencana pembangunannya.

Tidak kalah penting juga ialah pencegahan tindak pidana korupsi sebab tidak menutup kemungkinan praktik curang yang terjadi kekuasaan. Besarnya dana proyek pembangunan bisa menjadi pemicu untuk praktik penyelewengan dan korupsi. Upaya yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat dari daerah pinggiran diharus dikawal supaya tidak terjadi penyalahgunaan tersebut atau desentralisasi korupsi.¹⁷

D. Antara Ideologi dan Agama dalam Pembangunan

Dari gambaran di atas, tampak jelas bahwa pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK merupakan bagian dari industrialisasi yang menjadi tahapan modernisasi. Masyarakat Indonesia yang agraris dan bahari, hendak dialihkan

¹⁷ Muhammad Aqil Irham, “‘Neo-KKN’ dan Tantangan Demokratisasi Indonesia,” *ANALISIS* 16, no. 1 (2016): 34, <http://dx.doi.org/10.42042/analisis.v16i1.745>.

dengan ke arah masyarakat industri. Persiapan infrastruktur yang dibangun pemerintah memang bertujuan untuk mempercepat mobilisasi guna memudahkan pembangunan daerah-daerah sehingga arus barang dan juga orang bisa lebih leluasa. Dengan pembangunan infrastruktur itu, diharapkan bisa membuka akses pembangunan lanjutan di daerah-daerah dengan semangat otonomi daerah. Sehingga potensi kembang setiap daerah bisa berjalan seiringan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya, pemerintah menekankan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi itu sebagai cara untuk mengatasi problematikan perekonomian yang ditengarai berimbas pada perubahan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi dan kesenjangan pun bisa teratasi.

Logika demikian ini berlandaskan pada ideologi Pancasila yang telah menjadi dasar dan falsafah hidup bangsa. Ideologi memang berperan dalam struktur tindakan sosial dan lebih-lebih lagi tindakan politik pemerintah. Ideologi berfungsi sebagai motif bagi sebuah tindakan politik. Semangat membangun itu terlihat jelas sebagai upaya penafsiran terhadap ideologi yang telah diyakini bersama dan menjadi suatu alasan tentang tentunya tindakan.¹⁸ Pemerintahan Jokowi-JK menafsirkan dan mengimplementasikan ideologi Pancasila dengan pembangunan yang dilakukannya untuk keadilan bagi seluruh rakyat dan demi menjaga persatuan Indonesia. Tentu saja cita-cita itu merupakan cita-cita luhur.

Dari sudut pandang agama, upaya mewujudkan kemanusiaan yang sejahtera tentulah tidak bertentangan. Semua agama mengajarkan agar manusia hidup sejahtera di dunia dan menggapai kebahagiaan di akhirat. Dua dimensi tersebut adalah tolok ukur dalam setiap agama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam terminologi Islam disebutkan dengan *mashlahah al-ammah* atau kesejahteraan umum. Yang berbeda dalam Islam, ialah dimensi pembangunan tidak hanya sekedar kebahagiaan dunia saja, melainkan juga bertujuan untuk kebahagiaan akhirat. Suatu pembangunan bertujuan memberikan kesejahteraan sebab dengan kesejahteraan masyarakat bisa dengan tenang dalam beribadah. Tentu saja, sesuatu yang dinilai tidak melanggar bagi kemashlahatan umum, maka hal

¹⁸ Haryatmoko, *Etika politik dan kekuasaan*, h.17.

pun dinilai baik dalam Islam.¹⁹ Banyak doktrin dan norma motivatif yang menandakan bahwa Islam sangat mendukung perubahan yang terjadi di dunia seiring dengan perkembangan peradaban dunia itu sendiri. Jika Islam sebagai agama dan ideologi sekaligus, maka semangat perubahan menuju ke arah yang lebih baik juga senafas dengan perjuangan Islam, sebab ideologi akan membimbing kepada perwujudan tujuan dari ideologi itu sendiri.²⁰

Dengan demikian, industrialisasi itu juga menimbulkan sebuah konsekuensi baru, seperti terjadinya urbanisasi karena sebenarnya keberadaan industri itu selalu berpusat di kota. Sebagaimana kenyataan saat ini, kota selalu menjadi tujuan utama dari perpindahan penduduk (urbanisasi) dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan sedangkan kultur dari sebuah masyarakat kota dengan modernisasi yang dialaminya itu juga memberikan pengaruh pola pikir dan pola perilaku. Dari sisi ekonomi, masyarakat menjadi lebih konsumtif karena pendapatan perkapita mengalami kenaikan. Sisi buka telah melahirkan budaya pop (*pop culture*). Dari sisi sosial, tercipta masyarakat yang individualis karena waktu mereka selalu dihabiskan untuk bekerja dan mencari penghasilan sehingga waktu untuk menjalin ikatan sosial lebih terbatas.²¹

Memang, hingga saat ini, yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan ialah laju pertumbuhan ekonomi yang diiringi pula peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Masyarakat sejahtera apabila telah memenuhi standar minimal pendapatan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dan laju pertumbuhan ekonominya. Namun, kenyataan itu terkadang tidak sesuai dengan realitanya sebab angka-angka tersebut tak lain juga bagian dari politisasi kekuasaan. Di sinilah ambiguisme

¹⁹ Maryam Jameelah dan Margaret Marcus, *Islam dan Modernisasi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h.67.

²⁰ Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam: pemikiran Ali Syari'ati* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.151.

²¹ Belakangan, problem-problem itu dinilai sebagian agamawan sebagai faktor penghambat bagi ketaatan umat dalam menjalankan perintah agama. Tetapi tidak sedikit pula yang menawarkan tentang perlawanan melalui pendekatan keagamaan atau teologi kemanusiaan dan teologi pembebasan. Lihat misalnya karya Mansour Fakhri, *Jalan lain: manifesto intelektual organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press, 2002).

pembangunan karena pada kenyataannya, jurang antara masyarakat sejahtera, pra sejahtera, dan tidak sejahtera terlalu timpang.²² Hal ini selalu menjadi kenyataan pahit dalam setiap laporan yang dibuat oleh pemerintah. Dampak yang demikian ini justru akan menimbulkan dampak lain yang mesti dihadapi. Artinya, pembangunan yang dilakukan pemerintah terkadang juga tidak mampu memberikan kesejahteraan secara lebih baik untuk seluruh masyarakat. Sedangkan bila berkaca para pendapat dalam teori sistem Platonis, bahwa kesejahteraan masyarakat itu baru dinyatakan terwujud bila lapangan kerja yang bisa menyejahterakan masyarakat berjalan seiring dengan jumlah penduduk. Para ekonom pun mensinyalir hal yang demikian itu, tetapi negara di dunia ketiga masih banyak yang belum mampu mencapainya.

Selain industrialisasi, sebagai bagian dari proses modernisasi ialah sekularisasi. Sekularisasi ini tidak hanya terkait pemisahan antara urusan agama dan negara seja, melainkan terkait sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sebab, dalam pandangan modernis, sekularisasi adalah suatu keniscayaan dari sebuah proses modernisasi. Hal itu setidaknya dapat diketahui dari proses yang dialami oleh negara di Eropa pada abad Pencerahan hingga revolusi industri. Bahkan, bentuk-bentuk sekularisasi ini memiliki banyak wajah, mulai dari kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan lainnya.²³

Dengan sekularisasi, norma-norma tradisional telah tidak lagi dominan dan bahkan harus mengalah demi mencapai tujuan modernisasi. Karena itu, perkembangan sekularisasi dalam bidang sistem budaya dan sosial hanyut dalam modernisasi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Artinya, sesuatu yang tidak memiliki pembenaran dari ilmu pengetahuan dianggap sesuatu yang tidak ilmiah sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Begitu juga dengan perlunya melakukan pemisahan antara ruang privat dan ranah publik, pemisahan antara urusan agama dan urusan negara, pemisahan

²² Data BPS menyebutkan bahwa masyarakat miskin itu sekitar 28 juta, masyarakat rentan miskin mencapai 40-an jutaan. Dua istilah ini memang mengasumsikan bahwa jumlah orang miskin sangat sedikit bila dibandingkan dengan 250 jutaan penduduk Indonesia. Tetapi, masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin ini angkanya cukup tinggi, padahal standar bagi yang masuk kategori ini juga masih jauh denan masyarakat sejahtera itu sendiri.

²³ Jameelah dan Marcus, *Islam dan Modernisasi*, h.40 dan Max Weber, *Sosiologi*, terj. Noorkholis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.361.

antara kekuasaan agama dan kekuasaan negara, dan lain sebagainya sebagaimana sekularisasi menurut Donald E Smith dan dampak sekularisasi terhadap hadap Jose Cassanova.

Tetapi, pada kenyataannya, sekularisasi di Indonesia tidaklah seekstrim kajian yang dilakukan oleh keduanya. Dalam praktik sekularisasi di Indonesia, agama dan budaya yang menjadi sumber doktrin dan norma tidaklah terlalu rentang jauh. Setidaknya hal itu dibisa dilihat dari kewenangan pemerintahan yang masih mengurus terhadap persoalan agama ini. Tidak ada pemisahan secara jelas sebagaimana negara-negara sekuler seperti Prancis dan Turki. Bahkan beberapa kalangan menyebutkan bahwa agama masih memiliki peranan dalam setiap negara tetapi tidaklah menjadi dominan. Dalam praktik di Indonesia, agama menjadi tameng bagi dampak buruh modernisasi serta anak turunannya—kapitalisme, liberalisme, hedonisme, konsumerisma, dan lain sebagainya.

Dampak negatif dari modernisasi itu perlu dilawan agar tidak menimbulkan kesenjangan. Bahkan, Mansour Fakih menilai bahwa neoliberalisme itu harus dilawan dengan cara menyadarkan masyarakat agar tidak buai oleh impian-impian sesaat dari modernisasi.²⁴ Namun, bahwa perubahan itu memang tidak bisa dielak oleh agama manapun karena sejatinya sejarah hidup manusia berjalan linear, yakni tumbuh dan berkembang seiring dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Artinya, perkembangan yang negatif harus ditinggalkan sedangkan pengalaman yang positif bisa dipertahankan. Persoalan kemanusiaan yang ditimbulkan dari modernisasi ini memang termasuk hal pelik karena pengaruhnya sampai kepada seluruh sistem kehidupan, baik sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tidak sedikit pula cendekiawan yang menilai bahwa manusia modern mengalami ironi karena tergerusnya jati diri dan lemahnya spritualitas.²⁵ Sebab itu, saat ini gejala kembalinya penguatan jati diri dan spiritualitas juga cukup mengemuka dan sekaligus membumikan nilai-nilai ajaran itu sebagai langkah konkrit untuk melakukan perlawanan.

²⁴ Fakih, *Jalan lain: manifesto intelektual organik*.

²⁵ Piet H Khaidir, *Nalar kemanusiaan, nalar perubahan sosial* (Jakarta: Teraju, 2006), h.11 dan M Amien Rais dan Okkie F Muttaqie, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Mizan, 1998), h.197.

Kenyataan demikian ini sudah pernah terjadi di Indonesia ketika pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunannya. Para cendikia menilai bahwa pembangunan yang dilakukan Orba akan menimbulkan banyak ekses yang bisa menyebabkan timbulnya konflik berkepanjangan. Memang, di satu sisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat tetapi konflik-konflik dan herizontal merajalela dengan upaya pembungkaman yang represif. Tetapi tidak sedikit yang mengakui bahwa program Orba telah menciptakan kestabilan ekonomi walaupun kesenjangan dalam pembangunan masih cukup terasa dengan kebijakan sentralistiknya. Pemerintah Orba membayar mahal pembangunannya dengan cara berhutang ke luar negeri yang ternyata turun membebani masyarakat pula.

Beban utang luar negeri ini memang tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi, pemerintahan ini telah mengundang banyak investor agar mau berinvestasi di negara ini. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah ini ialah mengurasngi subsidi konsumtif menjadi modal produktif. Pemerintah mengalihkan dana subsidi dengan alasan pemberian subsidi tidak sasaran karena penikmat subsidi lebih banyak dari kalangan menengah ke atas. Sebab itu, subsidi dialihkan ke ranah yang menunjang produktifitas, yakni pembangunan infrastruktur. Namun akibatnya, tidak adanya subsidi sama halnya dengan mengembalikan harga pada mekanisme pasar dan pemerintah tidak bisa mengintervensi. Hal inilah yang disebut liberalisasi pasar yang justru menimbulkan ekses lain. Masyarakat akan semakin terjepit dengan harga pasar yang tidak memiliki barometer jelas sebab para pemilik modal berperan besar dalam menentukan harga-harga di pasar.

Sedangkan jika dilihat dari program sebagaimana disebutkan di atas, maka seringkali ukuran keberhasilan pembangunan identik dengan terciptanya laju pertumbuhan infrastruktur, sarana dan prasana daerah yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian. Padahal kondisi ini akan memperburuk kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan karena selama ini pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana hanya terfokus di kawasan kota hampir di seluruh propinsi Indonesia. Selain itu kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara realitas

sering dijadikan *project oriented* dengan kualitas dari pembangunan yang rendah.²⁶

Hal ini secara kasat mata dapat kita melihatnya adanya setiap tahun perbaikan untuk infrastruktur, sarana dan prasarana yang telah dilakukan dari tahun sebelumnya oleh pemerintah pusat dan daerah seperti pembangunan perbaikan jalan hampir setiap tahun dilakukan penganggaran, pengembangan pelabuhan dan pembangunan bandara yang sering terbengkalai atau membutuhkan waktu di atas lima tahun sedangkan masa kepemimpinan telah berakhir. Begitu juga pembangunan pasar tradisional yang jauh dari jangkauan konsumen juga pasar tradisional yang dibangun seringkali terbengkalai begitu saja, serta pembangunan pendidikan terapan pada tingkat Politeknik dan SMK hanya terfokus di perkotaan sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat ekonomi rendah yang ada di desa.

Dengan demikian, pada dasarnya Islam sebagai ideologi tidaklah bertentangan dengan semangat pembangunan dalam nawacita yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebab hal itu bertujuan untuk kemaslahatan umat. Namun, praktik yang dilakukan oleh pemerintah ini perlu mendapatkan perhatian sebab setiap kali pembangunan menimbulkan ekses. Oleh sebab itu, pola sekularisasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga mengedepankan aspek-aspek nilai-nilai arifan lokal agar tidak menumbulkan ekses yang lebih besar. Apalagi, tujuan dari pembangunan itu ialah menyejahterakan rakyat.

E. Kesimpulan

Pada dasarnya, pembangunan sebagai upaya negara dalam menyejahteraan rakyat berbasiskan ideologi yang dianutnya. Semua agama juga telah menjadi motivasi bagi umatnya untuk melakukan yang terbaik demi mencapai kesejahteraan dalam hidup serta menunjang pemenuhan kewajiban agamanya. Selagi pembangunan itu untuk kemashlahatan rakyat, maka hal itu sejalan pula dengan

²⁶ Pada dasarnya negara memiliki tanggungjawab sosial yang berupa keadilan sosial. Hal ini juga telah menjadi semangat dalam pembangunan di Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Tentang keadilan dalam politik lihat Magnis-Suseno, *Etika politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, h.239-339.

cita-cita agama. Sedangkan mekanisme pembangunan serta cara dalam pembangunan merupakan hasil ijtihad politik dari pemerintah sebab Islam tidak mengajarkan tentang mekanisme pembangunan secara baku, melainkan hanya sekedar panduan umum saja. Sedangkan pembangunan yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK adalah bagian dari pengejawantahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Meski demikian, dalam upaya mengakomodir kepentingan ideologis dari kelompok Islam, pemerintahan Jokowi-JK masih belum bisa melakukan kompromi yang sesuai. Upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah mengajukan jargon saja, yakni Revolusi Mental. Jargon ini memang bersifat umum untuk mampu mengakomodir kepentingan ideologis dari kelompok Islam walaupun pada perkembangannya saat ini pemerintah lebih banyak menitikberatkan pembangunan pada infrastruktur. Padahal dampak berakibat pula pada terjadinya perubahan sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan yang justru membuat pembangunan jauh dari cita-cita mensejahterakan rakyat sehingga semangat pembangunan hanyalah menjadi jargon belaka. Hal ini telah terlihat dari perjalanan sejarah Indonesia di bawah Orba yang bisa sukses dalam pembangunan tetapi juga kekroposan kekuatan dalam negeri. [.]

Referensi

- Ali, Fachri. *Agama, Islam & Pembangunan*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia." *ANALISIS* 14 (2014): 28.
- Darto, Mariman. "Menjadi Tuan di Negeri Sendiri." *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 3 (2015).
- Fakih, Mansour. *Jalan lain: manifesto intelektual organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press, 2002.
- Halimah, Fitri. "Studi Deskriptif Penerapan Program Nawacita Presiden Joko Widodo Tentang Membangun Indonesia Dari Pinggiran Terhadap Kesejahteraan Warga Di Desa Kanoman

- Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo.” Universitas PGRI Yogyakarta, 2017.
- Haryatmoko, Johannes. *Etika politik dan kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Irham, Muhammad Aqil. “‘Neo-KKN’ dan Tantangan Demokratisasi Indonesia.” *ANALISIS* 16, no. 1 (2016): 34.
- Jameelah, Maryam, dan Margaret Marcus. *Islam dan Modernisasi*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Khaidir, Piet H. *Nalar kemanusiaan, nalar perubahan sosial*. Jakarta: Teraju, 2006.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Nashir, Haedar. *Agama dan Krisis Manusia Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rais, M Amien, dan Okkie F Muttaqie. *Tauhid Sosial: Formula Mengempur Kesenjangan*. Mizan, 1998.
- Rosana, Ellya. “Eksistensi Pancasila Sebagai Kontrak Sosial Umat Beragama.” *Jurnal TAPIS* 13, No. 2 (2017): 18.
- Singh, Bilveer, dan Zuly Qodir. *Gerakan Islam non mainstream dan kebangkitan Islam politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Soleman, Mochdar, dan Mohammad Noer. “Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015.” *POLITIK* 13, No. 1 (2017).
- Supriyadi, Eko. *Sosialisme Islam: pemikiran Ali Syari’ati*. Pustaka Pelajar, 2003.
- Syamsi, Syam Surya. “Nawa Cita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi,” 2015.
- Weber, Max. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Wibowo, I, Franz Magnis-Suseno, dan B Herry-Priyono. *Sesudah filsafat: esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Zuhraeni. “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik.” *ANALISIS* 14, No. 1 (2014).